

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan internasional merupakan aspek penting dalam ekonomi global. Perdagangan internasional memegang peran penting terhadap kemajuan negara maju dan negara berkembang. Bentuk perdagangan internasional dapat dilakukan dalam kerja sama bilateral, multilateral dan regional dan meliputi berbagai transaksi ekonomi dan perdagangan antar negara yang terlibat dalam kerja sama perdagangan (Devina Wistiasari et al., 2023).

Setiap negara didunia tidak akan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa adanya bantuan dari negara lain, khususnya menyangkut kebutuhan ekonomi. Faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional karena adanya saling membutuhkan barang yang diproduksi oleh negara lain, hal tersebut dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan barang di dalam negeri yang tidak dapat diproduksi secara mandiri. Oleh karena itu, dibutuhkan interaksi antar negara berupa perdagangan internasional (Nugroho, 2021).

WTO diyakini telah gagal dalam membentuk aturan dan kebijakan perdagangan multilateral di dunia, dan situasi tersebut menyebabkan banyak negara di dunia menerapkan regionalisasi dengan membentuk blok perdagangan sendiri untuk meliberalisasi perdagangan internasional (Ahmad Adi Nugroho, 2020). Lebih lanjut, Negara-negara tersebut tidak hanya dalam proses regionalisasi saja, namun ada juga yang memiliki hubungan bilateral dengan negara lain. Sejak mandeknya Doha Development Agenda (DDA) yang dimulai pada tahun 2001, belum ada kemajuan signifikan dalam perbaikan aturan sistem perdagangan multilateral dunia kedepannya. Kurangnya kebijakan liberalisasi perdagangan multinasional telah menyebabkan banyak negara mencari cara untuk mendapatkan manfaat dari perdagangan internasional.

Dalam kerja sama Internasional, terdapat lembaga-lembaga Internasional seperti IMF, IBRD, WTO, yang berkolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di negara-negara berkembang untuk merancang dan mengimplementasikan program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing negara. Lembaga-lembaga Internasional tersebut ikut serta

dan memainkan perannya untuk membantu dan memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan yang berkelanjutan di negara-negara berkembang (Laudia Tysara, 2022).

Terdapat bagian dari rencana strategis Kementerian Perdagangan yaitu dengan meningkatkan pangsa pasar ekspor di pasar perspektif dan menjalin hubungan perdagangan internasional dalam bentuk kerja sama bilateral, regional dan multilateral sebagai bentuk respon terhadap pesatnya perubahan perekonomian dunia dan mengubah peta perdagangan dunia. Saat ini Indonesia telah menjalin kerja sama dengan beberapa negara mitra dagang lainnya dalam kerangka CEPA (*Comprehensive Economic Partnership Agreement*) (Kementerian Perdagangan, 2019a).

Kerja sama CEPA memiliki cakupan yang lebih luas seperti akses pasar, investasi, bantuan ekonomi, kerja sama teknologi dan energi terbarukan, serta pengembangan kapasitas dan fasilitas perdagangan yang bersifat *comprehensive* secara bilateral maupun regional atau blok kerja sama ekonomi, Indonesia melakukan kerja sama CEPA salah satunya yaitu dengan Chile yaitu IC-CEPA (pertapsi, 2020).

Pembentukan perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Chile (IC-CEPA) dimulai pada tahun 2006, dilanjutkan dengan penyusunan studi kelayakan oleh kedua negara melalui *Join Study Group* (JSG) pada tahun 2009 untuk membahas kelayakan dari perjanjian IC-CEPA. Hasil dari *Join Study Group* (JSG) menunjukkan bahwa IC-CEPA memiliki dampak positif hubungan ekonomi kedua negara untuk kedepannya. Lebih lanjut, perundingan putaran pertama IC-CEPA diselenggarakan di Santiago, Chile pada Mei 2014. Pada tahun 2017, Presiden Chile melakukan kunjungan kerja ke Indonesia dan menyampaikan harapannya agar perundingan IC-CEPA dapat direaktivasi. Dalam kajian ini, kedua negara sepakat melanjutkan perundingan di tahun yang sama, sehingga perundingan IC-CEPA dapat diselesaikan dalam 6 (enam) putaran. Putaran perundingan II dan VI diselesaikan dalam jangka waktu 9 (sembilan) bulan (Trade, n.d.).

IC-CEPA merupakan perjanjian perdagangan bebas pertama antara Indonesia dengan negara Amerika Latin. Tujuan IC-CEPA diantaranya yaitu dapat menjadikan Chile sebagai hub produk ekspor Indonesia di Amerika Latin dan mendorong para pelaku usaha Indonesia untuk hendak mengarah ke pasar baru di negara Chile dan wilayah Amerika latin lainnya. Dengan adanya penurunan tarif bea masuk, diharapkan

mampu meningkatkan volume perdagangan dari kedua belah pihak (St. H.R Rasuna Said, 2019).

Berlakunya IC-CEPA merupakan momentum yang bersejarah, karena menjadi perjanjian dagang pertama dengan negara Amerika Latin. IC-CEPA juga akan membuka pintu bagi produk ekspor Indonesia di wilayah Amerika Latin dengan lebih mudah. Letak geografis Chile yang strategis, dapat menjadikan Chile sebagai negara penghubung produk ekspor Indonesia di Amerika Latin. Chile dapat dijadikan sebagai hub produk ekspor Indonesia karena memiliki hubungan yang baik serta tingkat liberalisasi perdagangan yang tinggi di kawasan Amerika Latin dan Pasifik. Chile saat ini memiliki 29 perjanjian perdagangan bebas dengan 64 negara dan merupakan anggota asosiasi MERCOSUR, dan Kemitraan Trans-Pasifik (TPP). Dengan cara ini, akses pasar bagi produk ekspor Indonesia dapat ditingkatkan (Kementerian Perdagangan, 2019d). Adapun data menurut Kementerian Perdagangan Tahun 2014-2018 sebelum dilaksanakan kerja sama IC-CEPA Indonesia-Chile sebagai berikut:

**TABEL 1.1 NERACA PERDAGANGAN INDONESIA-CHILE 2014-2018
(RIBU USD)**

TAHUN	TOTAL PERDAGANGAN	EKSPOR	IMPOR	NERACA PERDAGANGAN
2014	419,4	177,8	241,5	-63,6
2015	321,1	147,3	173,8	-24,4
2016	227,1	143,8	83,3	60,4
2017	278,4	158,5	119,8	38,6
2018	274,1	159,0	115,1	43,9

Sumber: Kementerian Perdagangan

Total perdagangan antara Indonesia dengan Chile pada tahun 2014-2018 mengalami tren penurunan dari kedua sisi baik ekspor maupun impor sebesar -9,46%. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan akses pasar masing-masing negara seperti tarif yang tinggi, adanya hambatan non-tarif seperti prosedur bea cukai yang rumit, serta adanya ketidaktahuan tentang potensi pasar antara Chile dan Indonesia, perusahaan masing-masing negara kurang mengetahui permintaan dan preferensi masing-masing konsumen di kedua negara, hal ini dapat mengurangi minat bisnis untuk menjalin hubungan perdagangan. Sehingga diharapkan dengan adanya perjanjian kerja sama IC-CEPA dapat membuka peluang bagi kedua negara untuk dapat meningkatkan ekspor-

impor dari kedua belah pihak. Penurunan ekspor dan impor tersebut dapat mempengaruhi kondisi kedua negara. Sebab akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi yang menyebabkan menurunnya pendapatan nasional, memperlambat pertumbuhan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kedua negara (Kementerian Perdagangan, 2019b).

Kerjasama antara Indonesia dan Chile bukan sesuatu hal yang baru terjadi melainkan telah terjalin sejak tahun 1964. Kerjasama antar kedua negara mengalami fase naik turun. Sebelum adanya IC-CEPA, trend perdagangan mengalami penurunan, walaupun di tahun 2014 mengalami sedikit kenaikan, akan tetapi perdagangan mengalami penurunan kembali di tahun 2015-2016. Namun di tahun 2017 trend perdagangan kembali naik. Kerjasama Chile dan Indonesia ditunjukkan untuk meningkatkan kerjasama bilateral antara Indonesia dan negara-negara di Amerika Latin, termasuk Chile. Oleh sebab itu, kedua negara bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam kerangka IC-CEPA, yang ditandatangani pada tahun 2019 dengan harapan dapat meningkatkan perdagangan kedua negara yang lebih terintegrasi (Sidabutar, 2018).

B. Rumusan Masalah

Bagaimana implikasi dari IC-CEPA terhadap performa hubungan ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan Chile ?

C. Kerangka Teoritik

Untuk menjelaskan masalah yang telah dirumuskan diatas, riset ini memanfaatkan teori, yaitu:

1. Teori Ekonomi Liberal

Teori ekonomi liberal pemikiran Adam Smith adalah sebuah teori turunan dari teori liberalisme. Kaum yang menganut ideologi liberalisme menganggap kebebasan sebagai hal yang paling penting dan percaya bahwa pemerintah harus melakukan apa pun yang dapat menghalangi kebebasan. Kekuasaan negara konstitusional liberalisme dibatasi oleh kebutuhan untuk menghargai aturan hukum dan tuntutan ekonomi pasar. Adam Smith adalah pendiri liberalisme ekonomi, yang berpendapat bahwa pemerintah harus membiarkan pasar bekerja sendiri untuk mencapai pertumbuhan dan efisiensi yang tinggi. Adanya ketergantungan negara

dengan negara dan juga warga negara dengan warga negara merupakan suatu hal yang manusiawi. Ketergantungan antara negara pada sektor ekonomi yang mendorong negara untuk melakukan kerja sama sehingga terciptanya perdamaian sebab ketergantungan antar negara. Menurut liberalisme, Sektor ekonomi dijalankan melalui perdagangan internasional menjadi salah satu upaya negara untuk meningkatkan kerjasama internasional agar tercapainya kesejahteraan. Terlibat dalam pasar akan menguntungkan setiap orang dan menjamin kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, perdagangan bebas seharusnya menjadi dasar perekonomian internasional.

Dalam perekonomian liberal didasarkan pada kebutuhan pasar, maka pelaku usaha tidak akan memproduksi barang jika tidak dibutuhkan oleh konsumen atau masyarakat. Tentunya produk yang beredar di pasaran disesuaikan dengan kebutuhan konsumen atau masyarakat. Persaingan yang sangat tinggi dalam sistem ekonomi liberal mengakibatkan persaingan dalam hal kualitas produk. Dimana produsen bersaing untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan dimana masyarakat tertarik untuk membeli produk tersebut. Tujuannya adalah agar produk yang dihasilkan berbeda dengan produk produsen lain serta mempunyai kualitas dan nilai tambah yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Dengan begitu banyaknya dampak globalisasi, salah satu halnya adalah terhadap ekonomi yang seringkali tidak dapat dihindari dan untuk tetap dapat mengikuti perkembangan zaman (Isna Rifka Sri Rahayu, 2021).

Adapun beberapa aspek yang akan diliberalisasikan dalam ekonomi liberal yaitu :

1. Perdagangan barang dan jasa

- Pemerintah akan mengurangi atau menghilangkan bea masuk atas produk-produk yang masuk kedalam negeri, dengan tujuan untuk meningkatkan persaingan dan efisiensi di pasar dalam negara serta mendorong akses yang lebih luas terhadap barang-barang impor.
- Adanya liberalisasi perdagangan seperti jasa keuangan, telekomunikasi, dan transportasi akan dibuka lebih luas untuk kompetisi. Hal ini akan mengurangi pembatasan bagi penyedia jasa asing yang memasuki pasar domestik.

2. Investasi

- Pemerintah akan mengurangi pembatasan dan persyaratan yang membatasi investasi asing di dalam negeri, yang bertujuan untuk

menarik lebih banyak modal dan teknologi asing masuk ke dalam negeri.

- Perlindungan hak investor dan aset investasi untuk memberikan jaminan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak-hak investor asing dan aset investasinya, dengan tujuan memberikan kepastian dan ketenangan pikiran bagi perlindungan investor asing.
- Kemudahan prosedur perizinan dan kepemilikan perusahaan, proses perizinan investasi dan pendirian perusahaan akan disederhanakan untuk memfasilitasi masuknya investasi asing.

3. Pasar Tenaga Kerja:

- Peningkatan mobilitas pekerja antar negara. Upaya juga akan dilakukan untuk meningkatkan mobilitas tenaga kerja asing baik di dalam negeri maupun internasional. Hal ini dapat dicapai melalui perjanjian kerja sama antar negara atau peraturan visa yang lebih sederhana.
- Melonggarkan pembatasan mempekerjakan pekerja asing. Pembatasan terhadap perusahaan yang mempekerjakan pekerja asing akan dilonggarkan. Tujuannya adalah memberi perusahaan akses terhadap talenta dan keahlian global yang mereka butuhkan.

4. Sektor Keuangan

- modal dan pertukaran mata uang. Pemerintah akan melonggarkan pembatasan pergerakan modal di dalam dan luar negeri. Hal ini juga memfasilitasi pertukaran mata uang domestik ke mata uang asing.
- Melonggarkan pembatasan kepemilikan asing atas lembaga keuangan dalam negeri. Sektor perbankan dan lembaga keuangan dalam negeri akan semakin terbuka terhadap partisipasi modal asing. Tujuannya adalah untuk meningkatkan persaingan dan efisiensi di sektor keuangan.
- Deregulasi dan pengawasan sektor perbankan. Pengaturan dan pengawasan kegiatan sektor perbankan dan keuangan akan dipermudah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan bertindak kepada lembaga keuangan.

Secara keseluruhan, liberalisasi di berbagai aspek ekonomi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, dan integrasi ekonomi dalam sistem ekonomi liberal. Dari beberapa aspek yang akan diliberalisasikan

tersebut terdapat peran dari lembaga-lembaga internasional seperti WTO, IBRD, dan IMF dalam mendukung dan mempromosikan prinsip-prinsip ekonomi liberal di tingkat global. Lembaga-lembaga tersebut akan memfasilitasi liberalisasi perdagangan, mendorong reformasi ekonomi berbasis pasar bebas, dan membantu menjaga stabilitas sistem keuangan internasional (Kemlu.go.id, 2018).

2. Kerja sama Ekonomi Internasional

Kerja sama ekonomi internasional merupakan kerja sama yang menunjukkan hubungan antar negara dalam bidang ekonomi berdasarkan kepentingan tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan struktur perekonomian nasional. Tujuan terciptanya kerjasama ekonomi internasional adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi negara. Tujuan dalam menjalin kerjasama internasional adalah dapat meningkatkan perekonomian antar negara, meningkatkan taraf hidup, saling mengisi kekurangan dan kebutuhan perekonomian masing-masing negara, memperluas pasar dan meningkatkan devisa negara.

Kerja sama ekonomi internasional juga memiliki dampak pada negara-negara yang bekerja sama, yaitu stabilitas harga, permintaan dan penawaran, penyelesaian berbagai masalah perekonomian bersama, memperkuat posisi pedagang negara dengan meningkatnya ekspor, meningkatkan perekonomian dalam negeri, dan meningkatkan pendapatan negara. Salah satu bentuk kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama antar negara. Kerja sama ini merupakan hubungan antara satu negara dengan negara lainnya. Beberapa negara biasanya tergabung dalam sebuah lembaga karena ingin mencapai tujuan yang sama (simpkb.id, 2019)

Berdasarkan bentuknya, kerja sama ekonomi internasional terbagi dalam 3 macam, yaitu:

1. Kerjasama Ekonomi Regional

Kerjasama Regional merupakan kerjasama yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan Regional. Kerjasama antar negara ini dilakukan oleh negara-negara yang berada di suatu kawasan tertentu yang biasanya berdekatan. Tujuan kerja sama regional biasanya sesuai kepentingan masing-masing negara. Namun secara umum untuk memajukan negara-negara yang berada di suatu kawasan atau wilayah (dephub.go.id, 2020).

2. Kerjasama Ekonomi Bilateral

Kerja sama bilateral adalah bentuk kerja sama ekonomi yang terjadi antara dua negara. Dua negara ini saling membantu terutama dalam bidang ekonomi antara negara yang satu dengan negara yang (Muhammad Zaenuddin, 2023).

3. Kerjasama Ekonomi Multilateral

Kerja sama Multilateral adalah kerja sama ekonomi antar beberapa negara, dimana yang tergabung dalam kerja sama itu saling membantu di bidang ekonomi. Bentuk kerjasama ini tidak dibatasi satu wilayah tertentu jadi negara yang berada di luar kawasan pun dapat bergabung dalam badan yang berbentuk kerja sama multilateral ini (Dwi Latifatul Fajri, 2022).

Berdasarkan ketiga kategori bentuk kerjasama tersebut di atas, maka teori kerjasama internasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah kerjasama bilateral, yaitu kerjasama antara dua negara saja. Adapun dua negara dimaksud yang menjalin kerja sama bilateral sebagai objek pembahasan adalah Indonesia dan Chile, khususnya dalam kerja sama kerangka CEPA, untuk perjanjian perdagangan kedua negara agar terdapat peningkatan perekonomian kedua negara serta memanfaatkan peluang pasar yang belum dijajaki sebelumnya. Mengenai konsep hubungan bilateral, Didi Krisna mengatakan dalam kamus politik internasionalnya; “Hubungan bilateral adalah suatu keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau adanya hubungan timbal balik antara dua pihak atau dua negara.”

Kerja sama bilateral juga dapat diartikan adanya kepentingan yang menjadi dasar kesepakatan komunikasi antara dua negara dalam suatu bidang dengan cara dan tujuan yang disepakati bersama. Dalam kerangka pemahaman Charles Armor McClelland dijelaskan bahwa kerja sama internasional adalah segala bentuk interaksi antara masyarakat dan negara, yang dilakukan oleh pemerintah dan warga negaranya. Beberapa pemerintahan melakukan pendekatan satu sama lain untuk membahas tujuan negaranya, kemudian kedua negara mengadakan negosiasi dan menyatakan kemungkinan kedua negara bergabung dalam perjanjian khusus yang saling memuaskan dan menguntungkan. Proses ini kemudian disebut kerja sama (Mochamad Arif Yusuf, 2021).

Dalam kerja sama ekonomi internasional terdapat peran lembaga internasional yang memiliki fungsinya masing-masing, antara lain yaitu :

1. IBRD (*International Bank Reconstruction and Development*)

IBRD atau World Bank/ Bank Dunia didirikan pada tanggal 27 Desember 1945 dan berkedudukan di Washington Amerika Serikat. IBRD adalah bank pembangunan yang dikelola oleh bank dunia, IBRD sendiri menawarkan produk keuangan dan saran kebijakan kepada negara-negara yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan mendorong pembangunan berkelanjutan (Kelly Kenton, 2021).

2. IMF (*International Monetary Fund*)

IMF adalah lembaga keuangan internasional yang berada dibawah naungan PBB yang didirikan untuk dapat menciptakan stabilitas sistem keuangan internasional. IMF didirikan pada 27 September 1945, berada di Washington, Amerika Serikat. IMF merupakan lembaga yang bergerak di bidang keuangan dan seringkali memberikan pinjaman dana kepada negara-negara anggota yang membutuhkan. Peran IMF adalah lembaga yang berada di tengah sistem moneter internasional seluruh dunia. Sistem tersebut diantaranya pembayaran dan juga nilai tukar mata uang. Serta, menadi sumber dana untuk permasalahan neraca perdagangan (Ocbc.id, 2023).

3. WTO (*World Trade Organization*)

WTO adalah organisasi internasional yang didirikan dengan tujuan menghilangkan dan mengurangi rintangan-rintangan perdagang internasional, khususnya tarif bea cukai yang tinggi, yang sangat menghambat dan mempersulit ekspor impor antar negara (wto.org, 2019). Peran lembaga-lembaga internasional ini sangat penting dalam mendukung dan mempromosikan kerjasama ekonomi internasional yang lebih erat, stabil, dan berkeadilan. Lembaga-lembaga tersebut membantu menciptakan lingkungan ekonomi global yang kondusif bagi pertumbuhan, pembangunan, dan integrasi ekonomi antar negara.

3. (CEPA) *Comprehensive Economic Partnership Agreement*

CEPA secara umum merupakan rancangan perjanjian kerjasama antara akses pasar, pengembangan kapasitas serta perdagangan dan investasi. Kerja sama CEPA dapat dilakukan secara bilateral atau dalam blok kerja sama ekonomi. Komprehensif sendiri dapat diartikan dengan memandang suatu hal secara luas dan melihatnya dari berbagai sudut pandang sehingga dapat memahami

permasalahan secara menyeluruh dan menyelesaikannya dengan baik. Oleh karena itu, dalam perjanjian kemitraan ekonomi secara umum dapat juga diartikan sebagai perjanjian ekonomi yang menyeluruh atau luas yang mencakup sektor jasa, perdagangan, dan investasi di dalam kerja sama ekonomi. Kemitraan komprehensif itu sendiri mempunyai prinsip saling menguntungkan dan hubungan ekonomi antar pemangku kepentingan diharapkan semakin kuat (Pertapsi.or.id, 2020).

Perbedaan antara CEPA dan hubungan ekonomi lainnya yaitu dari tujuan perjanjiannya. CEPA dilakukan untuk mengurangi hambatan perdagangan, dan penerapan perjanjian ini secara bertahap akan mengurangi biaya impor dengan cara yang sama bijak juga mencakup banyak daerah lain untuk bekerjasama. CEPA sering kali mencakup komitmen yang lebih mendalam antara pihak-pihak yang terlibat, seperti pengurangan atau penghapusan tarif impor, mendorong investasi asing langsung, memastikan standar umum untuk produk atau layanan. Selain itu, proses negosiasi CEPA lebih kuat dan kompleks dibandingkan kerja sama ekonomi pada umumnya. Sebab, negara-negara peserta harus mencapai kesepakatan khusus lainnya di berbagai sektor ekonomi. Dalam hal kerjasama, CEPA menawarkan kekuatan dan fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan kerjasama ekonomi pada umumnya dalam penerapan peraturan dan ketentuan. Hal ini dapat mencakup langkah-langkah perlindungan investor, penyelesaian sengketa negara, atau jadwal penurunan tarif yang lebih terstruktur dan sistematis. CEPA memiliki tujuan strategis jangka panjang seperti meningkatkan integrasi ekonomi antar negara, meningkatkan stabilitas ekonomi dan mendorong kelancaran arus barang dan jasa (Olivia, 2019).

Inti dari kerjasama CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) adalah terciptanya integrasi ekonomi yang lebih dalam dan saling menguntungkan antar pihak. CEPA mempunyai beberapa poin utama yaitu liberalisasi perdagangan komprehensif dimana CEPA mencakup liberalisasi perdagangan barang dan jasa yang lebih luas dan mendalam, meningkatkan akses pasar, mengurangi hambatan perdagangan dan memfasilitasi perdagangan yang lebih bebas antar pihak. CEPA juga melindungi investasi asing bersama untuk meningkatkan arus investasi dan mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan. CEPA juga memiliki kerja sama ekonomi strategis yang mencakup kerja sama di berbagai sektor seperti transportasi, teknologi, dan energi untuk meningkatkan daya saing, inovasi, dan pembangunan ekonomi yang saling menguntungkan. Selain itu, CEPA memberikan peraturan dan

prosedur yang jelas, transparan dan dapat diprediksi di berbagai bidang ekonomi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan menguntungkan bagi pengusaha. Oleh karena itu, inti kerjasama CEPA adalah terciptanya kerangka ekonomi dan perdagangan yang saling menguntungkan antar pihak (kemendag.go.id, 2019).

D. Hipotesis

IC-CEPA dapat menghasilkan peningkatan signifikan dalam value atau nilai perdagangan dan menjaga keseimbangan neraca perdagangan antara Chile dan Indonesia. Dengan adanya perjanjian ini, tarif perdagangan antara kedua negara dapat dikurangi atau dihapuskan, sehingga mendorong pertumbuhan perdagangan antara Indonesia dan Chile.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk melihat dampak dari kerja sama IC-CEPA terhadap hubungan ekonomi dan perdagangan Indonesia dan Chile

F. Metode Penelitian

Implikasi dari kerja sama IC-CEPA dipilih berdasarkan pertimbangan, yaitu mengenai gagalnya WTO dalam membuat aturan dan kebijakan perdagangan multilateral sehingga negara-negara berkembang mencari kerjasama lain yang lebih comprehensive untuk perekonomian negaranya, seperti halnya Indonesia dan Chile melakukan kerja sama CEPA, dengan harapan meningkatkan kerjasama kedua negara yang dapat menurunkan tarif bea masuk sehingga kedua negara dapat meningkatkan volume perdagangan kedua negara.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena sosial ataupun perilaku manusia melalui analisis data non numerik dari berbagai sumber (Umai, 2023). Selain itu, metode penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang menggunakan teknik pengumpulan data secara gabungan, menganalisis data yang bersifat induktif dan hasilnya lebih mengarah kepada makna (Prasanti, 2018).

Data yang digunakan dalam riset ini bersumber dari data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data tidak langsung. Data sekunder didapatkan dari lembaga terkait serta data yang terdapat dalam penelitian. Sehingga data sekunder dapat bersumber dari dokumen jurnal, buku, website, dan sumber lainnya yang dapat digunakan untuk menulis penelitian (Prasanti, 2018).

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu teknik kepustakaan. Dimana teknik kepustakaan suatu studi yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data, dengan adanya bantuan dari sumber-sumber seperti buku, dokumen, jurnal, sejarah, serta artikel yang berkaitan dengan topik yang akan di bahas. Teknik ini dilakukan secara sistematis untuk memperoleh, mengumpulkan, mengolah, serta menyimpulkan data-data yang di dapat untuk menyelesaikan topik permasalahan yang diteliti (Sari & Asmendri, 2020).

G. Jangkauan Penelitian

Untuk membatasi masalah yang akan dijelaskan dalam skripsi ini, maka penulis memberikan batasan penelitian berupa pembahasan kerjasama IC-CEPA dari segi perdagangan ekspor dan impor selama 2019-2022.

H. Sistematika Penulisan

Laporan riset ini ditulis dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pada bab ini akan membahas pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, kerangka teori, metodologi, hipotesis, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Pada bab ini berisi hubungan bilateral Indonesia Chile sebelum berlakunya IC-CEPA yang dimulai dari uraian Gambaran Indonesia dan Chile, serta hubungan politik dan ekonomi Indonesia Chile.

BAB III : Pada bab ini berisi perencanaan dan konsep CEPA yang dimulai dari uraian tujuan perjanjian, kemudian kilas balik perundingan IC-CEPA, pemberlakuan perjanjian IC-CEPA, perencanaan dan Perjanjian IC-CEPA, dan diakhiri peran pemerintah dalam memperkuat hubungan dagang Indonesia Chile CEPA.

BAB VI : Pada bab ini berisi hubungan ekonomi dan perdagangan Indonesia Chile pasca implementasi IC-CEPA yang dimulai dari uraian dampak perdagangan

Indonesia dan Chile setelah berlakunya IC-CEPA, serta dampak ekonomi dari perjanjian IC-CEPA.

BAB V : Pada bab ini berisi penjelasan kesimpulan dari hasil akhir penelitian yang sudah dilakukan.